



RIBUT SOAL PEMILU 2024 BERLANJUT KAMIS PUTUSAN SISTEM PEMILIHAN GUGATAN BARU PUN MENYAMBUT

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya akan mengetok putusan yang paling ditunggu terkait Pemilu 2024. Rencananya putusan itu akan diketok pada Kamis (15/6/2023) mendatang. Apakah tetap sistem pemilu terbuka, diubah menjadi tertutup atau ada alternatif lain. Dari gedung parlemen bergaung harapan ramalan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana terkait sistem pemilu coblos parpol tidak benar. Di sisi lain, gugatan baru pun mencuat. Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP menggugat ketentuansoal larangan kampanye di sejumlah tempat. Regulasi tersebut diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang (UU) Pemilu. Tak hanya itu, Koalisi Sipil Kawal Pemilu Bersih juga mendaftarkan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung (MA) soal aturan jeda waktu 5 tahun bagi eks terpidana yang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Saat Pemilu 2024 mendekat, gugat-menggugat tampaknya makin menguat.

(Baca Hal 11)

JEJAK GUGATAN SISTEM PEMILU

14 NOVEMBER 2022
Enam orang mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu tentang sistem proporsional terbuka. Mereka berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Keenamnya adalah:

1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi (bacaleg 2024)
4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel)
5. Riyanto (warga Pekalongan)
6. Nono Marijono (warga Depok)

23 NOVEMBER 2022
MK menggelar sidang perdana dengan jadwal pemeriksaan pendahuluan I

7 DESEMBER 2022
MK menggelar sidang kedua dengan jadwal pemeriksaan pendahuluan II

20 DESEMBER 2022
MK gelar sidang ketiga dengan agenda keterangan DPR, Presiden, dan KPU

17 JANUARI 2023
MK menggelar sidang ke-4 dengan agenda keterangan DPR, Presiden, dan KPU

26 JANUARI 2023
MK menggelar sidang ke-5 dengan agenda keterangan DPR, Presiden, dan KPU

9 FEBRUARI 2023
MK menggelar sidang ke-6 dengan agenda keterangan KPU, Pihak Terkait M Fathurrahman dkk, Pihak Terkait Sarlotha Febiola dkk, Pihak Terkait Asnawi dkk

16 FEBRUARI 2023
MK menggelar sidang ke-7 dengan agenda mendengarkan Keterangan Pihak Terkait DPP Partai Garuda, Pihak Terkait Hermawi Taslim, Pihak Terkait Wibi Andriano

23 FEBRUARI 2023
MK menggelar sidang ke-8 dengan agenda mendengarkan Keterangan Pihak Terkait DPP PKS, Pihak Terkait DPP PSI, Anthony Winza Prabowo, August Hamonangan, dan Wiliam Aditya Sarana, dan Pihak Terkait Muhammad Sholeh

8 MARET 2023
MK menggelar sidang ke-9 dengan agenda mendengarkan keterangan Pihak Terkait DPP PBB, dan Pihak Terkait Derek Loupaty, dkk

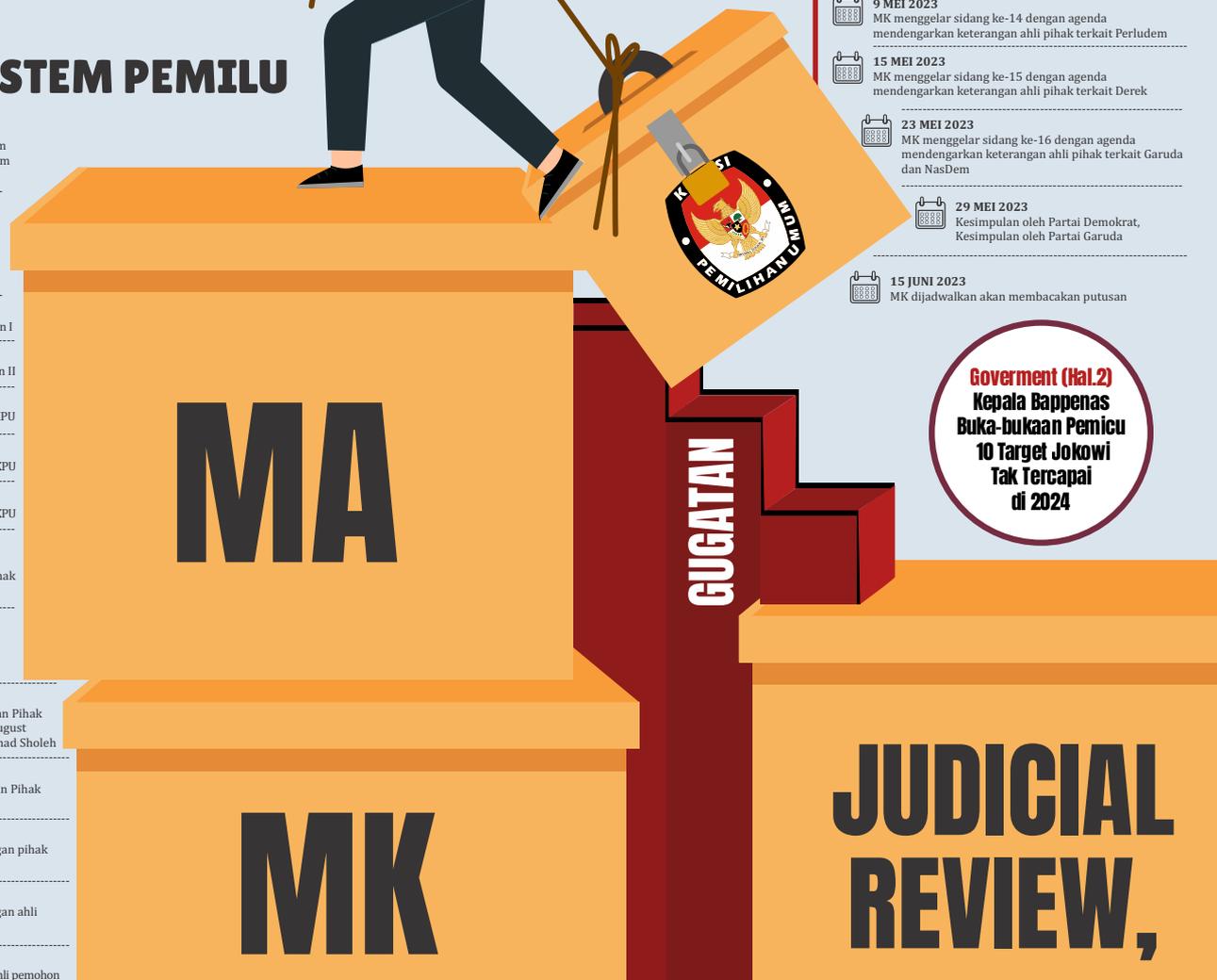
16 MARET 2023
MK menggelar sidang ke-10 dengan agenda mendengarkan keterangan pihak Terkait Perludem dan Pihak Terkait Jansen Sitindaon

29 MARET 2023
MK menggelar sidang ke-11 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon

5 APRIL 2023
MK menggelar sidang ke-12 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon

- 12 APRIL 2023**
MK menggelar sidang ke-13 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon
- 9 MEI 2023**
MK menggelar sidang ke-14 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pihak terkait Perludem
- 15 MEI 2023**
MK menggelar sidang ke-15 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pihak terkait Derek
- 23 MEI 2023**
MK menggelar sidang ke-16 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pihak terkait Garuda dan NasDem
- 29 MEI 2023**
Kesimpulan oleh Partai Demokrat, Kesimpulan oleh Partai Garuda
- 15 JUNI 2023**
MK dijadwalkan akan membacakan putusan

**Government (Hal.2)
Kepala Bappenas
Buka-bukaan Pemicu
10 Target Jokowi
Tak Tercapai
di 2024**



JAKARTA- Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa buka-bukaan soal pemicu di balik tidak tercapainya 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bidang kesehatan. Menurutnya, banyak target yang tidak tercapai karena tidak sinkronnya rencana pembangunan nasional dengan daerah. Padahal, menurutnya Pemerintah Daerah seharusnya menjadikan rencana pembangunan nasional patokan dalam membentuk rencana pembangunan di daerahnya sendiri.

"Rencana pembangunan jangka menengah ini kan sifatnya nasional. Maka dia menjadi bukan milik pemerintah pusat saja, tapi juga pemerintah daerah. Ini lah sebabnya kalau daerah kemudian tidak sinkron rencana pembangunannya dengan yang nasional," ungkap Suharso di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Dia mencontohkan misalnya target penurunan angka stunting. Selama ini target itu sering dilihat hanya sebagai tanggung jawab pemerintah pusat. Padahal pemerintah daerah juga seharusnya ikut melakukan upaya agar target itu tercapai.

Target penurunan stunting sendiri menjadi salah satu dari 10 target RPJMN yang tidak bisa tercapai di tahun 2024. Target angka stunting pada balita ditargetkan turun hingga 14% tahun depan. Namun, capaian

KEPALA BAPPENAS BUKA-BUKAAN PEMICU 10 TARGET JOKOWI TAK TERCAPAI DI 2024

pada 2022 masih sebesar 21,6%.

Ketidakpaduan target itu dapat terlihat dari minimnya anggaran untuk menurunkan stunting di beberapa APBD Pemerintah Daerah. Suharso bilang ada yang cuma mengalokasikan 2-5% saja untuk penurunan angka stunting.

"Soal stunting misalnya, dianggap target nasional jadi tanggung jawab nasional aja, padahal itu yang kerjakan juga harus daerah juga. Jadi bayangkan berapa kabupaten kota yang kita intervensi sedemikian rupa sementara daerah hanya alokasikan stunting hanya 5% bahkan ada 2% dari APBD. Ini kayak asal ada aja," beber Suharso.

Adapun, 10 Indikator RPJMN berisiko tidak tercapai mulai dari peningkatan imunisasi dasar lengkap pada 2022 63,17% menjadi 90% di 2024.

Kedua, angka stunting pada balita dengan target yang harus dicapai sebesar 14% tahun depan. Namun, capaian pada 2022 masih sebesar 21,6%.

Ketiga, tingkat wasting balita atau penurunan berat badan yang baru menyentuh 7,7% pada 2022. Target RPJMN 2024 sebesar 7%.

Keempat, tuberkulosis yang ditargetkan 297 orang per 100 ribu penduduk pada 2024. Pada 2022 angkanya masih di kisaran 354 orang per 100.000 penduduk.

Kelima, eliminasi malaria yang sebesar 372 per kabupaten/kota pada 2022, dari target tahun depan sebanyak 405 per kabupaten/kota. Keenam, eliminasi kusta hanya 403 kabupaten/kota di 2022 dari target 514 per kabupaten/kota pada 2024.

Ketujuh, tingkat merokok pada anak yang masih di angka 9,10% per 2022. Target perokok anak di tahun 2024 adalah sebesar 8,7%.

Kedelapan, obesitas pada penduduk dewasa yang sebesar 21,8%

pada 2022. Kesembilan, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang diharapkan bisa menyentuh angka 100% di tahun depan, namun baru tercapai 56,4% tahun 2022. Kesepuluh, puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar yang baru 56,07% dari target 83%.

Program Jokowi Mestinya Dilanjutkan

Sebelumnya, Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai sosok yang bakal memimpin Indonesia ke depan harus bisa melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan pada era Jokowi. Lantaran manfaatnya sudah dirasakan masyarakat.

"Pembangunan yang menonjol yang bermanfaat buat masyarakat, ya infrastruktur, terutama infrastruktur jalan darat. Itu masyarakat sudah menikmati," kata Trubus.

Trubus menerangkan infrastruktur jalan, seperti tol hingga jalur alternatif, telah dibangun pada masa pemerintahan Jokowi. Infrastruktur jalan yang dibangun pada membantu mobilitas masyarakat luas dalam berpindah dari satu lokasi ke tempat lainnya. Harga-harga bahan kebutuhan pokok juga bisa relatif sama antardaerah distribusinya semakin lancar.

Tidak hanya itu, Trubus menilai pembangunan pada era Jokowi tidak hanya terfokus di wilayah barat Indonesia. Pembangunan nasional turut dilaksanakan di wilayah timur, seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Sulawesi.

Oleh karena itu, Trubus menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan era Jokowi oleh pemimpin berikutnya. Dia mewanti-wanti soal kemungkinan sejumlah proyek mangkrak jika keberlanjutan pembangunan

tidak terjadi di Indonesia.

Dia mencontohkan seperti Hambalang yang pembangunan mangkrak hingga selesainya Presiden SBY. Dia juga khawatir IKN (Ibu Kota Negara Nusantara) tidak akan berlanjut, jika presiden selanjutnya tidak mampu membawa percepatan pembangunan.

Lain itu, banyak pembangunan proyek-proyek strategis lainnya tidak dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Salah satunya, proyek kereta cepat yang masih bisa dikembangkan hingga Surabaya untuk menyambungkan seluruh wilayah Jawa.

Sementara itu Staf khusus Kementerian Keuangan, Candra Fajri Ananda mengatakan selama masa pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi yang selama ini ditopang dari Jawa dan Sumatera mulai merata ke pulau-pulau lainnya. Salah satunya berkat transformasi struktural perekonomian melalui infrastruktur.

"Perekonomian kalau diperhatikan hampir 20-30 tahun terakhir bertumbuh di dua pulau, Jawa dan Sumatera. Namun, Kalimantan dan Sulawesi saat ini sudah mulai tumbuh bagus, jadi infrastruktur dalam konteks merubah transformasi ekonomi itu sudah ada hasilnya," kata Candra.

Guru besar dari Universitas Brawijaya itu menilai dampak pembangunan infrastruktur akan terasa dalam jangka panjang. Pemerintah juga telah melakukan pembangunan tidak hanya melalui infrastruktur jalan, tetapi juga infrastruktur kebutuhan masyarakat lainnya seperti air bersih dan listrik.

"Memang infrastruktur itu dampaknya jangka panjang. Kalau bicara soal infrastruktur bukan hanya masalah jalan, jadi infrastruktur itu ada air bersih, ada listrik. Yang terlihat mungkin jalan sangat agresif, dampaknya konektivitas kita makin bagus," ungkapnya. (wid.rls.ist/dya)

10 PROGRAM JOKOWI YANG DIRAMAL SULIT CAPAI TARGET PADA 2024

- Pengurangan Penyebaran Penyakit Malaria Menjadi 405 Kasus per Kabupaten/kota. Saat ini Baru Bisa Dilaksanakan Pengurangan 372 Kasus per Kabupaten/kota.
- Imunisasi Dasar Lengkap yang Ditarget Pada 2024 Mencapai Angka 90 Persen. Sampai 2022 Baru Menyentuh Angka 63,17 Persen.
- Angka Stunting Pada Balita yang Harus Bisa Ditekan Hingga 14 Persen Pada 2024. Namun, Hingga 2022 Baru Terealisasi 21,6 Persen.
- Tingkat Wasting Balita Atau Penurunan Berat Badan Ditargetkan Turun 7 Persen Pada 2024. Tapi Pada 2022 Lalu Masih Berada di Angka 7,7 Persen.
- Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (fktp) Ditargetkan Terakreditasi 100 Persen Pada 2024. Namun, Sampai 2022 Baru 56,4 Persen.
- Mengurangi Penduduk Dewasa yang Obesitas Sampai 21,8 Persen.
- Pengurangan Penyakit Kusta Sebanyak 514 Kasus per Kabupaten/ Kota. Saat ini Baru Terealisasi Eliminasi 403 Kasus per Kabupaten/ Kota.
- Pengurangan Tingkat Prevalensi Merokok Anak di Bawah Umur Menjadi 8,7 Persen. Pada 2022, Masih Tercatat Sebesar 9,10 Persen.
- Target Puskesmas Dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Mencapai 83 Persen di 2024. Realisasi 2022 Baru 56,07 Persen.
- Tuberkulosis (TBC) yang Ditargetkan Turun Menjadi 297 Per 100 Ribu Penduduk. Saat ini Masih Menyentuh Angka 354 per 100 Ribu Kasus.



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Soal Ekspor Pasir Laut, Menteri Jokowi 'Hujan' Kritik di DPR



Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat mengadakan rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI. (ist.dok)

JAKARTA-Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut 'banjir' kritik dari anggota DPR. Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, dalam penentuan material sedimentasi yang dapat dikeruk atau diambil diperlukan adanya kolaborasi melalui tim kajian. Tim tersebut akan memastikan kepentingan ekologi terjaga, sehingga tidak berdampak negatif bagi ekosistem.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP, Yohanis Fransiskus Lema mempertanyakan urgensi penerbitan PP tersebut. Sebab, pada 20 tahun sebelumnya pemerintah memutuskan untuk menerbitkan kebijakan perarangan ekspor pasir laut.

Selain itu, Yohanis menyoroti pertimbangan PP yang hanya mempertimbangkan UU nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. "Pertanyaannya kenapa UU terkait dengan perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam juga UU perikanan, atau terkait dengan perlindungan terhadap pulau pulau kecil ini tidak dijadikan konsideran," ujar Yohanis dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Senin (12/6/2023).

Sementara, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Slamet menyoroti minimnya partisipasi publik penerbitan PP 26/2023. Dia meminta peningkatan pengawasan penerapan PP agar tidak merusak ekologi kelautan. "Kami juga tidak menolak niat baik pemerintah, tetapi jangan sampai tidak transparansi ini ada penumpang gelap dalam PP ini," kata Slamet.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem Yessy Melania mengatakan,

yang menjadi polemik di masyarakat terkait penerbitan PP 26/2023 pada pemanfaatan hasil sedimentasi yaitu ekspor pasir laut yang dinilai menjadi persoalan.

Menurutnya, PP tersebut masih terlalu bias dan liar jika aturan turunannya tidak betul-betul bisa menjadi aturan penguatan yang baik. "Kami berharap ini bisa menjadi kajian kita bersama ketika membuat kajian-kajian ke depan, publik dan pemangku kepentingan terkait itu dilibatkan," ucap Yessy.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Demokrat Nuraeni menilai, sebelum adanya PP 26/2023 produksi perikanan terbilang rendah. Setelah terbitnya PP tersebut, Nuraeni berharap produksi perikanan tidak menurun.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah mengatakan, PP 26/2023 seharusnya menjadi terobosan karena mencakup perlindungan ekosistem sekaligus mempertimbangkan manfaat ekonomi dari hasil sedimentasi.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR TA Khalid mengakui keberadaan sedimentasi di muara-muara sungai di Aceh menghambat pergerakan nelayan melaut. Pendangkalan muara sungai akibat sedimentasi membuat kapal-kapal nelayan tidak bisa melintas.

"Di Aceh panjang pantai 2.666 Km sangat panjang, sehingga banyak muara yang dangkal. Maka setelah saya membaca PP tersebut saya rasa ini solusi," bebarnya.

Dia berharap KKP segera menyelesaikan peraturan turunan PP 26/2023 yang akan menjadi panduan teknis pengelolaan hasil sedimentasi

di laut. Dengan adanya panduan, pengelolaan sedimentasi menjadi lebih tertata dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

Dipastikan Ramah Lingkungan

Terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan sempat bertemu dengan pengusaha dredging atau pengerukan hingga perwakilan perusahaan operator kapal penggal material dasar air untuk membicarakan terkait ekspor pasir laut.

Pertemuan tersebut dilakukan pertengahan Mei 2023. Trenggono mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk meminta saran terkait alat pembersihan sedimentasi laut yang ramah lingkungan.

Trenggono membantah bahwa perusahaan-perusahaan yang di-undang adalah yang akan diuntungkan terkait dibukanya keran ekspor pasir laut melalui PP Nomor 26 Tahun 2023.

"Kalau itu kan secara teknis kan untuk kemudian mencari masukan atau informasi, sebetulnya yang ramah lingkungan kualitasnya apa, itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ekologi, karena kan dunia melihat semua," ujarnya.

Menteri Sakti Wahyu Trenggono juga mengatakan, "Di peraturan pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 itu dikatakan betul, untuk menentukan apakah dia (material) sedimentasi, harus ada Tim Kajian. Dibentuk dulu. Siapa isinya? KKP sendiri, Kementerian ESDM, KLHK, perguruan tinggi, Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah (Pemda), lembaga lingkungan, kumpul, ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, bekerjalah mereka," dalam keterangan resmi yang diterima.

Adapun pembentukan Tim Kajian, lanjut dia, tertuang dalam Pasal 5 Bab Perencanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Tim ini bertugas menyusun dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang berisikan sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume hasil sedimentasi.

Trenggono mengungkap alasan perlunya penerbitan regulasi tata kelola hasil sedimentasi di laut. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan tingginya permintaan material reklamasi di dalam negeri. Sebab selama ini reklamasi mengandalkan pasir laut yang di beberapa lokasi praktik pengambilannya tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. Ia berharap dengan adanya regulasi ini, kegiatan reklamasi harus menggunakan hasil sedimentasi yang diambil menggunakan alat ramah lingkungan. (wid,rls,ant/dya)



KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN EKSPOR PASIR LAUT OLEH INDONESIA

KEUNTUNGAN

- **Meningkatkan Pendapatan Negara:** Ekspor pasir dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan royalti.
- **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal:** Aktivitas ekspor pasir dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar tempat penambangan.
- **Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam:** Dengan melakukan ekspor, Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan pasir laut yang merupakan sumber daya alam yang melimpah.
- **Peningkatan Hubungan Internasional:** Ekspor pasir laut dapat meningkatkan hubungan dagang dan diplomasi dengan negara-negara importir.
- **Pengembangan Infrastruktur:** Pendapatan dari ekspor pasir laut dapat digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur di daerah pesisir dan sekitarnya.

KERUGIAN

- **Dampak Lingkungan** Eksploitasi pasir laut dalam jumlah besar dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti erosi pantai, penurunan kualitas air laut, dan penghancuran habitat laut.
- **Konflik Sosial** Ekspor pasir laut dapat memicu konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, konflik antara perusahaan penambangan dengan masyarakat lokal terkait hak atas tanah dan dampak lingkungan.
- **Kesulitan Pengawasan** Ekspor pasir laut seringkali dihadapkan pada tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum, seperti praktik ilegal mining dan perdagangan ilegal yang dapat merugikan negara.
- **Pulau Tenggelam** Pulau-pulau kecil terancam tenggelam akibat erosi dan perubahan arus laut.
- **Dampak pada Nelayan** Populasi ikan berpotensi berkurang dan mengganggu kehidupan nelayan lokal.



Realisasi Investasi Jatim Triwulan I/2023 Capai Rp30 Triliun



Salah satu investasi dalam bentuk industri sepatu yang menyerap banyak tenaga kerja.

PADANG - Pertumbuhan investasi di Jawa Timur pada tahun 2023 semakin menggeliat. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/ BKPM RI, tercatat realisasi investasi PMA dan PMDN Jawa Timur di triwulan I 2023 mencapai Rp 30 Triliun atau secara yon-y meningkat 27,1% dari triwulan I 2022. Sedangkan pertumbuhan investasi nasional dalam kurun waktu yang sama sebesar 16,5%.

"Alhamdulillah, pertumbuhan realisasi investasi Jatim konsisten di atas nasional. Triwulan I tahun ini realisasi investasi PMA dan PMDN Jawa Timur mencapai 27,1 persen atau setara Rp. 30 Triliun, dimana capaian tersebut di atas realisasi nasional yaitu 16,5 persen," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di sela-sela misi dagang ke Padang Sumatera Barat, Senin (12/6/2023).

Menurut Gubernur Khofifah capaian ini merupakan wujud dari komitmen Jawa Timur dalam mengawal investasi sejalan dengan arahan Presiden yang mendukung hilirisasi. Terlebih Jawa Timur memiliki sektor hilirisasi unggulan yakni tambaga.

"Jawa Timur merupakan satu-satunya Provinsi di Pulau Jawa yang memiliki investasi di sektor hilir dengan komoditi tambaga, dimana investasi sektor hilir mayoritas berlokasi di luar Pulau Jawa," ujar Gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa pada realisasi investasi triwulan I 2023 sebesar Rp 30 triliun ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai Rp 14,5 triliun atau tumbuh melonjak sebesar 76,8% dibanding triwulan I 2022 yang sebesar Rp 8,2 triliun. Sedangkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp 15,5 triliun dibanding triwulan I 2022 sebesar Rp 15,4 triliun.

Kontributor tertinggi realisasi investasi secara total PMA dan PMDN adalah sektor Pertambangan (16,5%), Industri Logam Dasar, Barang Logam Bukan Mesin & Peralatannya (13,8%), Transportasi, Gudang & Telekomunikasi (11,1%), Industri Kimia & Farmasi

(10,5%) serta Perumahan, Kawasan, Industri & Perkantoran (9,4%).

Sedangkan untuk Lokasi penyumbang terbesar meliputi Kab. Gresik (36,0%), Kota Surabaya (20,5%), Kab. Sidoarjo (10,1%), Kab. Pasuruan (8,4%) dan Kab. Tuban (4,4%). Sementara menurut Negara Asal, Realisasi PMA masih didominasi oleh investasi dari Amerika Serikat (37,8%), Jepang (24,0%), Singapura (8,3%), Hongkong, RRT (6,5%) dan Belanda (6,3%).

Proporsi antara PMA dan PMDN dalam realisasi investasi Jawa Timur triwulan I 2023, berturut-turut 48,3% dan 51,7% atau setara dengan Rp. 14,5 Triliun realisasi PMA dan Rp. 15,5 Triliun realisasi PMDN. Tingginya kontribusi realisasi PMA, secara linear menunjukkan tingginya kepercayaan investor asing terhadap potensi Jawa Timur di masa pemulihan pasca COVID-19.

Selain itu, keberhasilan menjaga kepercayaan investor asing terhadap Jawa Timur juga merupakan buah manis dari kerja keras Pemprov Jatim dalam melakukan pengelolaan investasi. Salah satunya pelayanan pra dan pasca perijinan yang terintegrasi secara digital dan komprehensif.

"Beberapa upaya pengelolaan investasi telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi, diantaranya pelayanan berbasis elektronik yang lebih mudah dan informasi elektronik peta Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Jawa Timur, dengan DPMPSTP sebagai garda utama," ungkap Khofifah.

Pelayanan berbasis elektronik dalam hal perizinan tersebut diwujudkan dalam inovasi JOSS Gandos (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang kini bisa diakses melalui perangkat smartphone berbasis android. JOSS Gandos tidak hanya sekadar menawarkan kemudahan akses, namun juga sudah mencakup implementasi penyederhanaan perizinan Pergub Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Pada Triwulan I 2023, DPMPSTP

tercatat telah menerbitkan 2.119 perizinan berusaha. Kemudahan dalam proses perizinan berusaha inilah yang menjadi salah satu daya tarik bagi para investor untuk menanam modalnya di Jatim.

Termasuk dengan gencarnya menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara potensial melalui misi dagang maupun para Kepala Perwakilan RI di negara-negara dunia. Seperti beberapa waktu lalu saat Gubernur Khofifah menerima kunjungan para Calon Kepala Perwakilan RI di beberapa negara.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah juga sempat memaparkan potensi-potensi investasi yang ada di Jawa Timur. Sehingga para Kepala Perwakilan RI juga bisa mempromosikan Jawa Timur di mata dunia.

Meski realisasi investasi triwulan I 2023 telah tercapai 35,3% dari target RPJMD sebesar Rp 85 triliun, Gubernur Khofifah menyampaikan agar tidak lengah karena adanya kemungkinan kejenuhan investor terhadap investasi di Pulau Jawa yang dibarengi dengan peningkatan infrastruktur di wilayah luar Pulau Jawa.

Sehingga, fokus utama adalah tetap menjaga dan meningkatkan iklim investasi dengan melakukan pengendalian terhadap pandemi yang masih belum hilang sepenuhnya dan menjaga stabilitas politik.

"Kita berharap dengan upaya-upaya yang digalakkan dapat meningkatkan kondusifitas berinvestasi di Jawa Timur, sehingga ke depan pelayanan investasi semakin cepat, mudah dan transparan yang berdampak pada kestabilan capaian realisasi investasi di Jawa Timur yang dapat menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan, kesejahteraan serta pemerataan ekonomi Jawa Timur," pungkash Khofifah.

Sementara itu, misi dagang dan investasi antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Hotel ZHM Premier Padang, Senin (12/6/2023) mencatat transaksi hingga Rp 231,7 Milyar. Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Adapun komoditi tertinggi dalam transaksi tersebut antara lain, Pakan Ikan dan Udang, komoditas cengkeh & tangkai cengkeh, kerjasama peternakan

sapi, kerjasama pembangunan perumahan, kerjasama pengembangan porang, benih pertanian, bahan bangunan, makanan Ringan, Pupuk, Jagung, kentang, Jahe gajah, sarang walet, ayam potong, dan tulang ikan.

Gubernur Khofifah mengungkapkan, misi dagang dan investasi menjadi salah satu strategi efektif untuk penguatan konektivitas perdagangan antar daerah baik di dalam maupun luar negeri. Karena itu, sejak pihaknya memimpin Jatim, Sumbar merupakan provinsi ke 32 yang menjadi tujuan Misi Dagang dan Investasi.

"Alhamdulillah, Komitmen transaksi ditutup dengan capaian 37 transaksi senilai Rp. 231,7 milyar," ungkap Gubernur Khofifah.

Khofifah menambahkan, selama menggelar misi dagang ke berbagai daerah di dalam maupun luar negeri, selalu ada peluang-peluang usaha yang baru. Ia berharap peluang-peluang usaha yang dibuka jalannya oleh Pemprov Jatim juga bisa bermanfaat untuk provinsi lain yang telah menjalin MoU dengan Jatim.

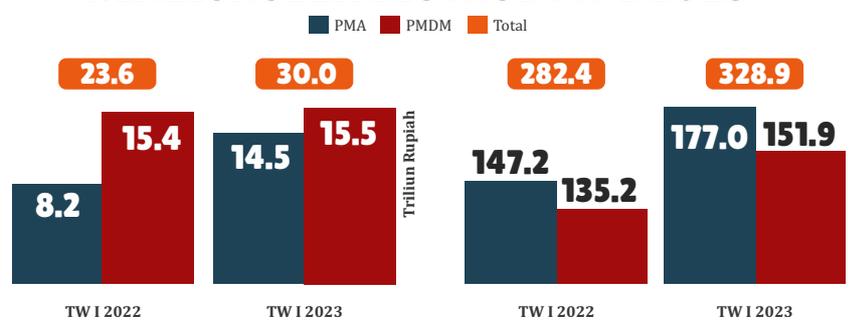
"Salah satunya saat kami misi dagang di Malaysia pada Desember tahun lalu, mereka membutuhkan kelapa banyak sekali. Nah, kalau dikirim dari Jatim, biayanya pasti akan besar. Jauh lebih hemat bila dikirim dari Sumbar," ujarnya.

"Saat ini produk kelapa tidak hanya daging (degan) saja yang dibutuhkan. Misi dagang kami ke Hongkong beberapa waktu lalu, awalnya mereka membutuhkan arang kelapa, kemudian sekarang berkembang menjadi arang kelapa berbentuk cair," imbuhnya.

Jaringan perdagangan ini pula yang ikut ditawarkan oleh Gubernur Khofifah kepada Pemprov Sumbar. Tujuannya tak lain, agar perekonomian kedua daerah bisa berkembang dan tumbuh bersama secara inklusif. Serta masyarakat di kedua wilayah semakin sejahtera.

"Kami harap jaringan perdagangan Jatim ini juga bisa diakses Sumbar. Karena Jatim dan Sumbar memiliki satu kesamaan yakni merupakan tempat kelahiran Sang Proklamator Republik Indonesia. Jatim merupakan tempat kelahiran Bung Karno, sedangkan Sumbar tempat kelahiran Bung Hatta," ungkapnya. (lut/dya)

REALISASI INVESTASI TW I 2023



Sumber: BKPM RI

Enam Catatan Banggar DPRD Jatim Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022

SURABAYA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyampaikan pendapat terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (12/6/2023) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar. Setidaknya ada enam catatan penting yang disampaikan Banggar terhadap Raperda tersebut.

Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Deni Prasetya, mengatakan bahwa penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD harus dilampiri laporan keuangan yang memuat, antara lain: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Berdasarkan Nota Keuangan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pelaksanaan APBD TA 2022 terdiri dari Pos Pendapatan Daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp.29.564.645.101.806. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.31.904.776.417.444,02 sen atau 107,92%.

Dengan demikian terdapat pelampauan pendapatan sekitar Rp.2.340.131.315.638,02 sen atau 7,92% dari target yang ditetapkan. Pelampauan pendapatan ini berasal dari PAD yang mencapai 117,20% dan lain lain pendapatan yang sah mencapai 192,46% dari target yang ditetapkan.

"Pendapatan transfer dari pemerintah pusat tahun 2022 memang mengalami penurunan dari target yang ditetapkan sebesar Rp.11.397.951.773.269 dengan realisasi sebesar Rp.10.563.739.586.218 atau mencapai 92,68%," ujar Deni Prasetya.

Sementara, untuk pos Belanja Daerah, kata Deni setelah P-APBD 2022 ditetapkan sebesar Rp.33.601.144.045.605. Adapun realisasinya sebesar Rp.31.802.993.060.590,78 sen atau 93,76% dari target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan target belanja daerah dengan realisasi belanja daerah, terdapat penghematan Rp2.098.150.985.014,22 sen. Dengan besarnya penghematan ini, maka Banggar meminta agar kedepannya apabila harus dilakukan penghematan tidak dilakukan pada pos belanja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat Jatim," harap Deni.

"Sebaliknya jika melihat selisih antara realisasi pendapat daerah dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp.401.783.356.853,24 sen, serta ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp.4.044.541.429.699,13 sen,



Juru bicara Banggar DPRD Jatim Deni Prasetyo menyerahkan pendapat Banggar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Jawa Timur 2023.

sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) TA 2022 sebesar Rp.4.446.324.786.552,37 sen," imbuhnya.

Setelah mencermati landasan hukum dalam penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim TA 2022 dan LHP BPK, maka Banggar berpendapat bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim TA 2022 LAYAK untuk dibahas lebih lanjut oleh Komisi Komisi dan Fraksi Fraksi sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendati demikian, kata Deni Prasetya Banggar menyampaikan beberapa catatan, antara lain ; yang pertama, realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp.31,9 triliun lebih adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan TA 2021 yang mencapai Rp.34,2 triliun lebih. Padahal pertumbuhan ekonomi tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,34 % lebih tinggi daripada tahun 2021 sebesar 3,57 %. Namun penurunan pendapatan daerah dalam kondisi ekonomi Jatim yang semakin mengalami peningkatan akan menjadi perhatian dan materi pembahasan Banggar dengan Tim Anggaran Pemprov Jatim," jelasnya.

Kedua, berlakunya HKPD dan berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pajak daerah banyak yang berakibat pada penurunan realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. Padahal pajak daerah memberikan kontribusi

terbesar terhadap besarnya PAD dan kemampuan fiskal Pemprov Jatim.

"Oleh sebab itu Banggar akan melakukan pendalaman dengan Tim Anggaran terhadap berbagai potensi penerimaan dari sektor pajak daerah dan sektor lainnya untuk mempertahankan kemampuan fiskal Jatim," kata politikus Partai NasDem.

Ketiga, dana SILPA TA 2022 sangatlah besar yaitu Rp.4,4 triliun lebih. Namun pada sisi lain belanja daerah terjadi penghematan sebesar Rp.2 triliun lebih atau 6,24%. Penghematan belanja tersebut banyak terjadi pada jenis belanja subsidi sebesar 68,62%, belanja bansos 86,69%, belanja modal tanah 65,81%, serta belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 74,91%.

"Besarnya penghematan anggaran belanja ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam tahapan perencanaan anggaran atau ketidak-laksanaan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD TA 2022," ujar Deni.

Oleh karena itu Banggar akan melakukan pencermatan dan pendalaman penyebab besarnya Silpa dan besarnya penghematan belanja daerah TA 2022. Banggar juga akan melakukan pencermatan dan pendalaman terhadap penggunaan dana Silpa dalam TA 2023 dan juga rencana penggunaan dalam perubahan APBD TA 2023.

Keempat, realisasi BTT hanya 16,40% dari alokasi sebesar 709 miliar lebih juga akan dicermati dan didalami Banggar bersama Tim

Anggaran Pemprov Jatim supaya bisa dialihkan pada program mitigasi bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pelaksana OPD terkait.

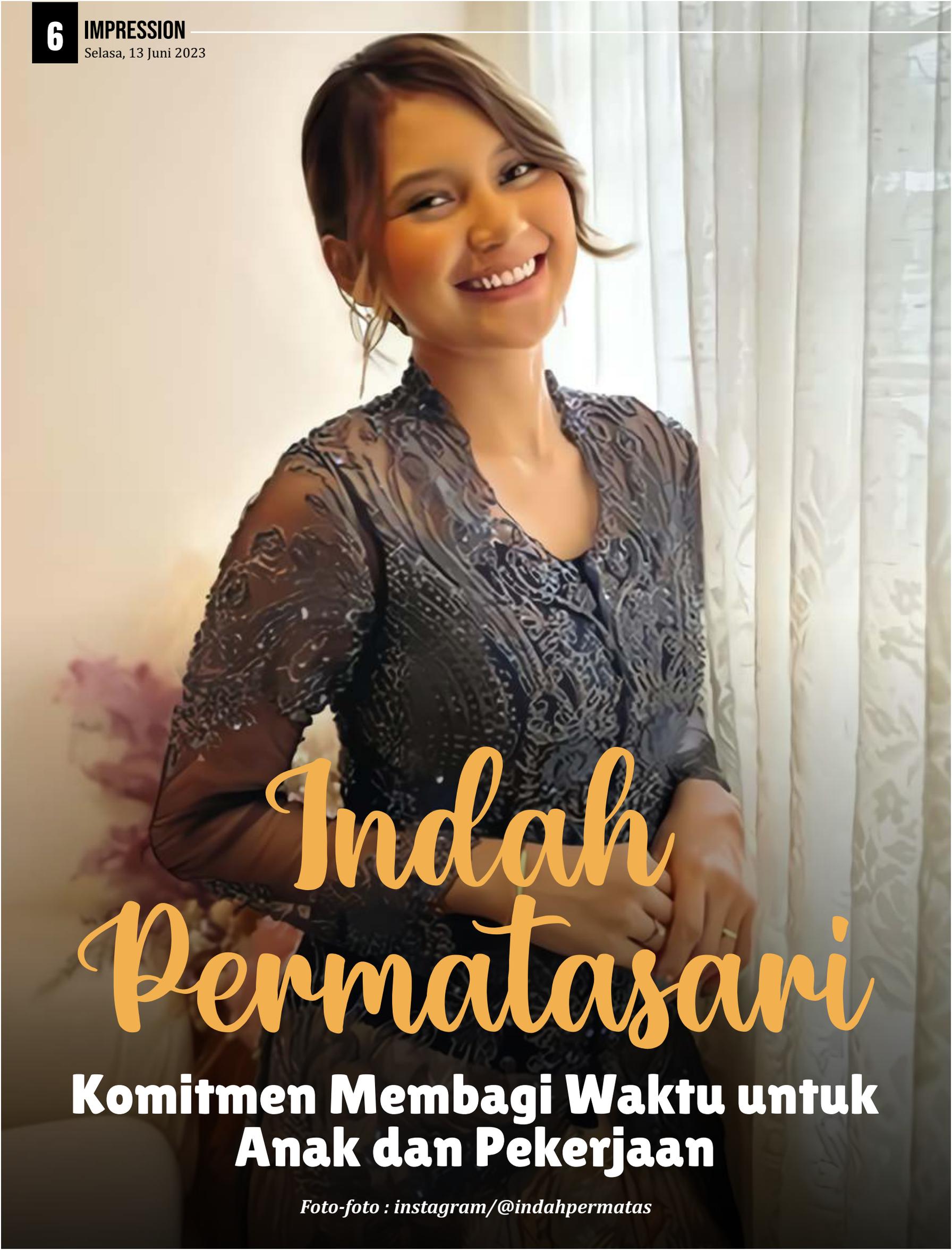
"Mengingat, Jatim memiliki banyak potensi bencana dan setiap tahunnya selalu terjadi bencana yang menimbulkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan maupun kehilangan nyawa," ungkap Deni Prasetya.

Kelima, ada 10 BUMD milik pemprov Jatim, lanjut Deni kontribusinya terhadap PAD hanya Rp.441,44 miliar atau 2,07%. Padahal penyertaan daerah yang telah disetor kepada BUMD sampai tahun 2022 sangat besar yakni Rp.13,4 triliun lebih.

"Karena itu Banggar akan mendalami atau bahkan bisa juga mengevaluasi kebijakan anggaran terhadap BUMD dalam rangka mengoptimalkan kinerja BUMD terhadap peningkatan PAD Pemprov Jatim," jelas anggota Komisi D DPRD Jatim.

Terakhir atau keenam, lanjut Deni pada tahun 2024 mendatang akan diselenggarakan Pilkada serentak termasuk untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim periode 2024-2029. Hal ini tentunya juga menjadi perhatian banggar untuk mengalokasikan kebutuhan dana Pilgub di luar Dana Cadangan yang telah ditetapkan sebesar Rp.600 miliar.

"Sisa kebutuhan dana Pilgub Jatim di luar dana cadangan tersebut dapat dialokasikan dalam perubahan APBD 2023 atau dalam APBD murni tahun 2024," pungkas Deni prasetya. (lut/dya)



Indah Permatasari

Komitmen Membagi Waktu untuk Anak dan Pekerjaan

Foto-foto : instagram/@indahpermatas



ARTIS peran Indah Permatasari membagikan ceritanya saat dia harus membagi waktu antara harus mengurus sang buah hati dengan menjalankan pekerjaannya.

Saat ditemui dalam konferensi pers film "Si Manis Jembatan Ancol 2," Indah mengatakan akan berkomitmen untuk dapat membagi waktunya menjaga anak sambil melakoni pekerjaannya sebagai seorang aktris.

"Iya, harus bisa komitmen (membagi waktu)," kata Indah.

Saat ini, sang anak telah berusia sembilan bulan dan sudah dapat memakan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI).

Bahkan, sang suami Arie Kriting juga turut membantunya mengurus sang buah hati saat dirinya memiliki

kesibukan lain, seperti bekerja.

Indah pun mengatakan Arie sangat proaktif sebagai ayah dalam menjaga sang anak. Arie pun dinilai sebagai suami yang telaten karena kepiawaiannya dalam mengurus sang anak, seperti menyuapi makanan, mengganti popok, dan lainnya.

Hingga saat ini, Indah dan Arie sepakat untuk tidak mengumbar wajah sang anak ke media massa. Bagi mereka, hal tersebut merupakan privasi dan tidak ingin orang lain mencampuri kehidupan pribadi mereka.

Meskipun begitu, Indah mengatakan wajah sang anak merupakan campuran dari keduanya.

Kini, setelah beberapa waktu mengurangi aktivitas pekerjaannya,

Indah akan kembali disibukkan dalam film terbarunya berjudul "Si Manis Jembatan Ancol 2."

Ia pun masih menimbang apakah akan membawa sang anak ke lokasi syuting atau tidak nantinya dan masih melihat situasi ke depannya.

Beruntung, ia tidak akan syuting di luar kota dan hanya di sekitar Jakarta, sehingga masih memungkinkan untuk tetap menjaga sang anak.

Indah pun berharap jika sang anak tumbuh dewasa nanti, ia ingin membebaskan keinginannya untuk menjalani hal dan profesi yang diinginkan. Ia juga belajar banyak dari orang-orang sekitarnya untuk menjadi orang tua yang baik.

"Kita tidak boleh mengecilkan anak," kata Indah.

Sebelumnya, Indah Permatasari mengaku kesulitan ketika memerankan Maryam dalam film "Si Manis Jembatan Ancol", lantaran tidak punya banyak waktu untuk mendalami karakter tokoh hantu itu.

Indah mengatakan baru bergabung dengan pemain lain pada detik-detik terakhir jelang proses produksi. Untuk itu, dia harus mengejar ketertinggalannya.

"Sangat sulit karena aku diberikan kesempatan last minute seperti yang dikatakan Anggy (Anggy Umbara). Membangun karakter Maryam sangat sedikit waktunya," kata Indah saat ditemui dalam acara peluncuran poster dan trailer "Si Manis Jembatan Ancol" di Jakarta.

Indah mengaku diberi kebebasan oleh sutradara Anggy Umbara untuk mengembangkan karakter Maryam di film itu sesuai dengan versinya sendiri.

"Kalau untuk nonton serialnya yang dulu sih enggak perlu karena ini beda dari cerita sebelumnya dan aku bisa build karakter versi aku," ujarnya.

Film "Si Manis Jembatan Ancol" juga dibintangi oleh Arifin Putra, Ozy Syahputra, Randy Pangalila, TJ, Arif Didu, dan pemain lainnya.

Indah Permatasari merupakan aktris yang lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada 16 Mei 1997.

Ayahnya bernama Nasruddin dan sang ibu bernama Nursyah.

Indah merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara. Ia memiliki dua orang kakak yang kembar.

Awal karier dari profil artis Indah Permatasari sebagai seorang aktris bermula di tahun 2009, tepatnya saat ia berusia 13 tahun.

Saat itu, ia membintangi sinetron Cinta Fitri 3 dan memerankan sosok Maya kecil.

Di awal-awal karier, Indah memang sering mendapat peran figuran.

Namanya mulai dikenal publik saat ia berhasil membintangi film Heart 2 yang tayang pada tahun 2010.

Saat ia memerankan peran Indah di sinetron Putri Duyung pada tahun 2013, namanya kian melambung.

Setelahnya ia justru sering mendapat tawaran sebagai peran utama di berbagai judul sinetron dan film (berbagai sumber)



KULIT MUDAH DEHIDRASI

BISA JADI TANDA PENUAAN DINI

PAKAR dermatologi dr Claudia Christin, MBBS, Ph.D mengatakan kulit yang mudah dehidrasi bisa menjadi salah satu tanda penuaan dini pada kulit dan ini bisa terjadi saat seseorang mulai berusia 25 tahun.

"Para perempuan mungkin merasa kalau dulu berminyak banget pas remaja. Tapi lama-lama usia 25 tahun, 30 tahun kulit jadi semakin cenderung kering, lebih gampang dehidrasi, kurang air dan itu memang tanda penuaan juga," kata dr Claudia di Jakarta.

Kulit yang dehidrasi biasanya ditandai dengan kulit terasa kering dan gatal, kusam, serta menjadi kurang elastis yang biasanya disebabkan tubuh kekurangan cairan.

Kondisi ini sebenarnya bukan satu-satunya tanda penuaan dini. Tanda penuaan dini kulit lainnya termasuk munculnya noda hitam akibat rusaknya respon melanin.

Menurut Claudia, kandungan retinol dapat mengatasi penuaan dini, namun penggunaan yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko iritasi.

Penelitian Portland State University (2020) menunjukkan bahwa penggunaan retinol yang berlebihan dan tidak tepat dapat menyebabkan iritasi seperti kulit memerah hingga pengelupasan kulit yang berlebihan.

Claudia lalu menuturkan, karena produk dengan retinol biasanya membutuhkan waktu penyesuaian dalam pemakaiannya dan harus disertai dengan penggunaan bersama tabir surya.

Berbicara lebih lanjut tentang kondisi kulit, dalam kesempatan itu,

Product Group Manager Pond's Essy Prita Cinta mengingatkan perempuan khususnya pada usia 25 tahun mengalami penurunan elastisitas kulit akibat pertambahan usia.

Faktor-faktor seperti polusi, paparan sinar UV dengan skala indeks di atas 5, kurangnya waktu tidur, nutrisi yang buruk, merokok dan stres mempercepat munculnya tanda penuaan dini pada kulit.

Oleh karena itu, sambung dia, pada usia ini, perempuan membutuhkan perawatan kulit yang lebih intens serta efektif untuk mengatasi tanda-tanda penuaan dini dan masalah kulit lain.

Essy juga menuturkan pentingnya kaum hawa untuk melakukan perawatan kulit yang mengandung bahan aktif yang efektif mengatasi penuaan dini.

Berdasarkan Penelitian Journal of Drugs in Dermatology (2022) kandungan retinol telah dipercaya selama puluhan tahun sebagai bahan aktif yang dapat merangsang produksi kolagen yang berguna untuk mencegah penuaan dini.

Kandungan niacinamide juga mendukung peran retinol dalam mencerahkan kulit dan menyamarkan noda hitam pada wajah.

Kulit kering dan kulit dehidrasi terdengar seakan sama, namun ternyata dua kondisi kulit ini punya penyebab yang berbeda.

Minyak atau lapisan lemak pada kulit adalah komponen yang tidak larut dalam air, sehingga berfungsi mempertahankan kelembapan kulit. Kondisi kulit kering juga dapat terjadi pada orang berusia 40 tahun ke atas

karena produksi minyak menurun seiring bertambahnya usia.

Ciri-cirinya

Ciri-cirinya antara lain kulit terasa kasar, kering, kaku atau tertarik pada kulit, dan mengelupas atau bersisik. Kulit biasanya juga terasa gatal, kemerahan, dan terdapat lapisan kulit mati berwarna putih seperti yang bisa dilihat pada siku.

Sementara itu, kulit dehidrasi terjadi sementara dan bisa diatasi bila kadar air dalam kulit sudah tercukupi. Penyebabnya bisa jadi karena kurang minum, terpapar sinar matahari yang terik, suhu panas atau dingin, kurang tidur, paparan pendingin udara, kurangnya kelembapan udara, obat-obatan, diet, penggunaan produk kosmetik hingga aktivitas yang padat.

Kulit dehidrasi dapat dialami oleh pemilik kulit kering, kombinasi atau berminyak. Saat kulit dehidrasi, lapisan pelindung kulit tak berfungsi optimal.

Ciri-ciri kulit dehidrasi adalah kulit tampak kusam, terasa kencang, tidak nyaman, dan kulit menjadi lebih sensitif.

Untuk mengatasinya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti minum air yang minimal delapan gelas per hari, tidur cukup dan mengonsumsi sayur serta buah yang mengandung air, vitamin serta mineral untuk kulit.

Jangan lupa untuk rutin

berolahraga setiap hari. Lakukan olahraga aerobik seperti jalan kaki, lari, bersepeda, berenang, dan menari selama 150 menit setiap pekan.

Anda bisa melakukannya 3-5 kali dalam seminggu dengan setiap sesi berdurasi antara 30 hingga 60 menit. Selain itu, gunakan pelembap yang membuat kulit terhidrasi (Ant)



APPLE VISION PRO HADIR, ERA SMARTPHONE BERAKHIR?

APPLE, perusahaan teknologi yang bermarkas di Amerika Serikat, memulai perjalanan baru dengan memperkenalkan Apple Vision Pro, sebuah headset berupa kacamata augmented reality, yang dapat menghadirkan gambar virtual dengan lebih nyata.

Apple menandai produk tersebut sebagai komputer spasial, yang dapat membawa pengguna nampak seperti ke sebuah ruangan secara realtime.

Perangkat ini digadang-gadang dapat menggantikan smartphone dalam beberapa tahun ke depan.

Pembawa acara senior pada salah satu stasiun televisi, Jon Erlichman menyebut dalam akun twitternya, salah satu tren yang memengaruhi produk Apple sehingga dapat menjadi pemimpin adalah mobilitas.

Adapun saat ini Apple memperkenalkan Apple

Vision Pro, sebuah kacamata super canggih.

Tidak hanya itu, Jon mengutip pernyataan Bos Apple Tim Cook, yang menyebut bahwa Apple Vision Pro bukanlah produk terakhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan.

Saat ini kacamata canggih ini memang nampak seperti kacamata renang yang besar dan hampir menutupi setengah wajah, namun berdasarkan histori, Apple selalu membuat perangkat menjadi makin minimalis.

Jon menilai apa yang diungkapkan Apple hari ini adalah bagian dari transisi yang diharapkan mengarah ke kacamata augmented reality. Transisi tersebut diperkirakan membutuhkan waktu 10 tahun.

"Pada saat itu, iPhone akan menjadi series 25! Terlepas dari apakah petaruhan baru Apple berhasil, itu adalah pengingat akan perubahan. Dan, produk yang menjadi bagian besar dari kehidupan saat ini mungkin memudar perannya dari waktu ke waktu," tulis Jon di akun twitternya @jonerlichman.

Dalam cuitannya Jon menyinggung bagaimana seluruh produk terbaik Apple pada akhirnya akan tergantikan dengan perangkat yang lebih baik lagi, yang juga diproduksi oleh Apple tentunya.

Masa depan iPhone, yang telah berusia 16 tahun dan menjadi produk terlaris Apple selama belasan tahun berturut-turut, berhasil menggeser popularitas iPod pada 2011, yang berkuasa selama 7 tahun di puncak.

Tidak menutup kemungkinan hal serupa juga akan terjadi di iPhone seiring dengan hadirnya Apple Vision Pro.

"Saat ini, diperkirakan 1,4 juta iPhone terjual setiap 2 hari. Tetapi apakah itu akan berubah dalam dekade mendatang?" tutup Jon.

Apple Vision Pro merupakan terobosan terbaru Apple dalam

bidang teknologi visual.

Keunggulan Apple Vision Pro

Apple Vision Pro hadir dengan sejumlah keunggulan yang membedakannya dari produk sejenis.

Pertama, teknologi visual yang disematkan dalam Apple Vision Pro memastikan gambar dan video yang dihasilkan memiliki kejelasan, kecerahan, dan detail yang luar biasa. Pengguna akan merasakan pengalaman visual yang memukau dengan warna yang akurat dan kontras yang tajam.

Selain itu, Apple Vision Pro juga dilengkapi dengan kemampuan kecerdasan buatan yang memungkinkan analisis gambar yang lebih baik dan pengenalan objek yang lebih akurat.

Fitur-Fitur Canggih Apple Vision Pro

Apple Vision Pro menawarkan berbagai fitur canggih yang memungkinkan pengguna merasakan teknologi visual terdepan.

Salah satu fitur utama adalah kemampuan pengenalan wajah dan deteksi sorotan mata yang sangat presisi, yang memungkinkan pengalaman autentik dalam pengenalan wajah dan interaksi manusia-mesin.

Selain itu, Apple Vision Pro juga mendukung peningkatan dalam pemrosesan gambar dan video secara real-time, termasuk pengurangan noise, peningkatan kualitas, dan pemulihan detail yang hilang.

Masa Depan Teknologi Visual

Dengan diperkenalkannya Apple Vision Pro, kita melihat langkah besar dalam pengembangan teknologi visual.

Inovasi ini membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut dalam bidang kecerdasan buatan, pengolahan gambar, pengenalan objek, dan aplikasi visual lainnya.

Masa depan teknologi visual sangat menjanjikan, dan Apple Vision Pro berada di garis depan perubahan ini (berbagai sumber)

KURANGI SAMPAH PLASTIK, WUJUD PEDULI LINGKUNGAN

ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) mendukung langkah-langkah mengurangi sampah plastik, sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan di tengah isu perubahan iklim yang menjadi perhatian di seluruh dunia.

"Pada situasi saat ini, yang dibicarakan bukan hanya soal ekonomi atau pemulihan setelah pandemi, tapi juga perubahan iklim. Bicara perubahan iklim, ini sangat relevan dengan bagaimana kita mengurangi plastik. Jadi melalui APRINDO, kami setuju untuk mengurangi plastik," kata Ketua Umum APRINDO Roy Nicholas Mandey dalam sebuah acara di Tangerang, Banten.

Roy mengatakan, APRINDO telah memulai langkah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sejak tahun 2018 serta bekerja sama dengan banyak institusi untuk menerapkan 3R yakni reduce (mengurangi plastik), reuse (menggunakan kembali plastik), dan recycle (mendaur ulang plastik).

Menurut Roy, upaya tersebut sangat penting dilakukan sebab lingkungan harus dijaga sehingga generasi di masa depan tetap memiliki sumber daya alam yang baik.

"Kita bicara soal generasi masa depan. Tentunya kita punya anak, punya cucu, lalu cucu kita punya anak, dan sebagainya. Bila kita tidak menjaga lingkungan, kita tidak menyelamatkan anak cucu kita. Jadi generasi saat ini harus menjaga (lingkungan) untuk generasi ke depan," ujar Roy.

Untuk itu, Roy pun mengapresiasi ritel yang telah melakukan gebrakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai saat belanja dan mengedukasi masyarakat agar beralih menggunakan kantong belanja yang dapat dipakai berulang kali.

Senada dengan Roy, Ketua Umum ADUPI Christine Halim juga menyampaikan pentingnya menjaga bumi dengan mengurangi sampah plastik.

Ia pun mengajak masyarakat mengumpulkan sampah plastik dan menyerahkannya ke titik-titik poin pengumpulan sampah plastik agar dapat didaur ulang.

"Setelah dikumpulkan, itu akan berguna bagi industri kami. Akan kami daur ulang bahan-bahan itu, bisa jadi baju, bisa jadi karpet," kata Christine.

Sehingga menurut Christine, manfaat yang lebih besar bisa diperoleh melalui pengurangan sampah plastik dan daur ulang plastik, yaitu tidak hanya uang tapi juga kebersihan lingkungan, kesehatan, hingga kesejahteraan bagi planet Bumi.

"Bumi kita masih satu. Kita harus

jaga dan rawat bumi ini demi anak cucu kita. Kita tentu tidak mau mewariskan sampah, tetapi yang mau kita wariskan adalah sumber daya yang lebih baik, kekayaan, kesehatan, dan kemakmuran," pungkas Christine.

Strategi KLH

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ikut menyerukan pentingnya tindakan pengendalian terhadap sampah plastik yang kini telah mencemari banyak sungai, daratan, hingga laut.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pemerintah telah menyusun strategi untuk menangani polusi plastik tersebut agar Indonesia bisa terbebas dari sampah plastik.

Bahkan, sampah plastik yang berakhir di lautan juga ditangani secara khusus dimana sebagai besar sampah plastik itu dihasilkan dari sumber polusi darat.

Pemerintah membuat kerangka hukum dan kelembagaan dalam proses pengolahan sampah yang komprehensif dengan implementasi yang efektif di tingkat nasional dan daerah, ter-

masuk pengawasan dalam siklus hidup produk plastik serta pendekatan pencegahan terhadap polusi limbah plastik dari daratan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2022, Indonesia menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah dan sekitar 18,5 persen dari volume sampah tersebut berupa sampah plastik.

Pada Mei 2023, Program Lingkungan PBB atau United Nations Environment Programme (UNEP) menerbitkan laporan tentang strategi dunia dalam mengakhiri polusi plastik dan menciptakan ekonomi sirkular. Laporan itu mengkaji model ekonomi dan bisnis yang diperlukan untuk mengatasi dampak ekonomi plastik.

Dalam laporan tersebut ada usulan perubahan sistem untuk mengatasi polusi plastik, menggabungkan pengurangan dan penggunaan plastik yang bermasalah, serta tidak perlu dengan transformasi pasar menuju sirkularitas dalam plastik.

Laporan itu juga menyoroti pentingnya mempercepat pasar daur ulang untuk daur ulang plastik dengan memastikan bahwa daur ulang menjadi usaha yang lebih menguntungkan.

Reorientasi dan diversifikasi mengacu pada pergeseran pasar menuju alternatif plastik berkelanjutan yang akan membutuhkan pergeseran permintaan konsumen, kerangka peraturan, dan biaya (Ant)



Ribut Soal Pemilu ... (dari hal 1)

MAHKAMAH Konstitusi (MK) segera memutuskan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam waktu dekat. Menurut jadwal sidang pengucapan putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 pada Kamis (15/6/2023). Apakah akan menggunakan sistem proporsional terbuka, proporsional tertutup, atau menggunakan model baru/campuran.

Anggota Komisi III DPR Santoso mengaku pihaknya tak akan mengevaluasi para hakim MK sebelum putusan. "Melakukan evaluasi terhadap para hakim MK sebelum keputusan tentang sistem pemilu itu diputuskan bukanlah cara yang bijak," papar Santoso dikutip Senin (12/6/2023).

Jika Hakim MK dievaluasi sebelum putusan, Santoso menyebut hal itu akan menimbulkan kontroversi serta kegaduhan di publik. Selain itu, juga akan menimbulkan interpersepsi dalam hal hukum apakah tindakan mengganti itu sesuai Undang-Undang (UU) atau tidak.

"Kita berharap para hakim MK dari manapun mereka berasal (DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung) yang masing-masing berjumlah tiga orang itu menyerap aspirasi serta keinginan kuat publik agar pemilu legislatif dengan sistem terbuka," ujar dia. Lantaran, kata dia, sistem terbuka telah dilakukan sejak 2009. Dia menyebut sistem terbuka dinilai lebih baik dibanding dengan sistem tertutup.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhan selaku perwakilan DPR, berharap ramalan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana terkait sistem pemilu menjadi proporsional tertutup tidak benar. Adapun perkara ini adalah uji materi terkait pasal sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka.

"Ya kita berharap ramalannya Pak Denny Indrayana tidak benar ya," ujar Habiburokhan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Habiburokhan mengatakan, DPR yakin MK akan memberi putusan yang terbaik atas gugatan tersebut, yaitu sistem proporsional terbuka. Dia pun mengungkit sikap DPR dan pemerintah yang tegas meminta agar pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. "Lalu begitu banyak pihak terkait, ini salah satu dua perkara yang rekor pihak terkaitnya paling banyak. Dan semuanya jelas menyampaikan ingin mempertahankan sistem proporsional terbuka," tuturnya.

Selanjutnya, Habiburokhan menyebut beberapa perwakilan partai politik di DPR juga sudah menyampaikan sikap secara jelas supaya sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Bahkan, kata dia, dalam berbagai lembaga survei, rakyat menginginkan proporsional terbuka. "Ini kan soal pilihan ya, bukan soal pidana yang benar yang mana dan sebagainya. Tapi rakyat lebih memilih yang mana," jelas Habiburokhan.

Sementara itu, Habiburokhan mengatakan, sejumlah perwakilan dari DPR akan hadir langsung ke Gedung MK saat pembacaan putusan berlangsung. Waketum Partai Gerindra ini masih memandang positif apa pun putusan MK soal sistem pemilu. "Ya kami akan hadir. Kan saya posisinya sebagai kuasa DPR di MK, bukan delapan atau sembilan (partai), tapi saya mewakili DPR, kami akan hadir," imbuhnya.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) membantah menunda-nunda putusan gugatan tentang sistem pemilihan umum (Pemilu). Padahal putusan atas perkara nomor 114/PUU-XX/2022 itu akan menentukan arah sistem Pemilu.

Gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu diajukan sejak November 2022. MK mengakui proses sidang perkara itu memang memakan waktu panjang untuk sampai ke tahap putusan.

"Kalau prosesnya lama, betul. Tetapi bukan berarti MK yang melakukan penundaan," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan, Senin (12/6/2023). Fajar menyampaikan proses gugatan ini berlangsung lama karena dipengaruhi banyaknya para pihak yang terlibat di dalamnya. MK mesti menyimak pandangan para pihak secara komprehensif sebelum sampai pada kesimpulan.

"Karena panjang pendeknya satu perkara diselesaikan itu bukan hanya bergantung pada MK karena itu juga bergantung pada para pihaknya," ujar Fajar. Fajar menyebut setidaknya ada 14 pihak terkait dalam gugatan tersebut. Mereka semua mengajukan diri untuk menyampaikan keterangan di dalam sidang. Permintaan itu lantas dikabulkan oleh MK. "Jadi butuh waktu yang lama karena itu. Lama bukan dalam konteks MK menunda atau memperlambat proses penyelesaian tapi karena memang kebutuhan dan dinamika perkara itu," ujar Fajar.

Selanjutnya, Fajar menjelaskan gugatan ini mencapai tahap penyerahan kesimpulan pada 31 Mei. Setelah itu, MK menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk tiba pada putusan yang akan dibacakan pada Kamis pekan ini. "Sekarang, hari ini sudah ditetapkan hari Kamis nanti pengucapan putusan. Jadi enggak ada penundaan-penundaan atau memperlama proses penyelesaian perkara," ujar Fajar.

Sebelumnya, gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diajukan oleh pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono beserta koleganya. Mereka keberatan dengan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2 UU Pemilu.

Bermunculan Gugatan Baru

Di sisi lain, Koalisi Sipil Kawal Pemilu Bersih sambangi Mahkamah Agung (MA) untuk mendaftarkan uji materi atau judicial review soal aturan jeda waktu 5 tahun bagi eks terpidana yang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Gugatan dilayangkan Saut Situmorang (eks Komisioner KPK), Kurnia Ramadhana (peneliti ICW), dan Fadli Ramadhani (peneliti Perludem). Mereka keluar dari gedung MA usai mendaftarkan gugatan pukul 14.20 WIB, Senin (12/6/2023).

"Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dari ICW bersama dengan dua eks Komisioner KPK, Saut Situmorang 2015-2019 dan Pak Abraham Samad 2011-2015, meng-ajukan uji materi terhadap PKPU Nomor 10 dan 11 tahun 2023," ujar Kurnia kepada wartawan di Gedung MA, Jakarta.

Mereka waktu yang dibuat KPU untuk pemilu 2024 mendatang lantaran dinilai memberikan 'diskon' untuk waktu jeda bagi para eks terpidana yang mau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Akibatnya menurut mereka, aturan KPU tersebut justru merusak integritas pemilu mendatang.

"Bagi kami PKPU bentukan KPU itu adalah upaya untuk mendegradasi nilai integritas pada pemilu mendatang," sambungnya.

Sementara itu, Saut Situmorang yang tidak ditemani oleh Abraham Samad sebagai perwakilan eks Komisioner KPK, berharap MA bisa segera memutuskan aturan mana yang harus diikuti di pesta demokrasi mendatang. "Dalam artian, kalau pun terjadi perdebatan tentang masa waktu itu, itu sudah diputuskan dan tentunya harus diikuti (judicial review yang mereka ajukan). Jadi ini semoga bisa diputuskan segera," tutupnya.

Ada pun Peraturan KPU (PKPU) nomor 10/2023 dan 11/2023 menjadi sorotan karena dianggap memberikan "karpet merah" bagi mantan terpidana bisa menjadi caleg pemilu tanpa masa tunggu 5 tahun seperti di putusan MK nomor 87/2022 dan 12/2023. Dalam PKPU itu, KPU mengatur mantan terpidana bisa nyaleg tanpa harus menunggu jeda 5 tahun sepanjang tidak dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Jika mantan terpidana dijatuhi pencabutan hak politik 3 tahun, bisa jadi caleg tanpa jeda 5 tahun.

Dalam kasus berbeda, Ong Yenny melalui tim hukum Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP mengugat ketentuan itu ke MK. Pasal bersangkutan menyebutkan larangan peserta dan tim kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Namun, dalam penjelasan pasalnya, larangan tersebut dikecualikan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye ataupun atas undangan pihak penanggung jawab tiga fasilitas itu. Nah, dalam gugatannya, Ong Yenny menilai norma tersebut tidak berkepastian, khususnya norma dalam penjelasan pasal. Anggota DPRD DKI Jakarta itu menilai pengecualian dalam penjelasan tersebut membuat kampanye di tiga tempat itu rawan diakali.

Karena itu, Ong Yenny meminta MK menghapus norma dalam penjelasan. Dengan demikian, larangan

kampanye di tiga tempat tersebut berlaku tanpa pengecualian. "Pelarangan yang sudah jelas dan tegas yang diatur di pasal 280 ayat (1) huruf h tersebut seharusnya tidak perlu lagi diberi penjelasan," ungkapinya.

Terlebih, Ong Yenny menilai penjelasan pasalnya tidak sesuai kriteria yang diatur UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Dalam UU P3 disebutkan, penjelasan-penjelasan pasal hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan istilah asing.

Adapun pasal 280 ayat (1) huruf h, Ong Yenny menilai sudah jauh melampauinya. Karena berisi hal yang bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh ataupun menambah pengertian norma yang ada. "Ini berakibat terjadinya pertentangan antara penjelasan pasal dengan materi pokok. Sehingga berakibat terjadinya ketidakpastian hukum," tuturnya. (wid,rls,ant,mer,kum/dya)

SIMULASI PENAFSIRAN ATURAN SOAL EKS-NAPI NYALEG

- **Studi Kasus:** seorang terdakwa berinisial A terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan terlibat kasus korupsi yang merugikan keuangan negara pada Januari 2010. Majelis hakim menjatuhkannya vonis 10 tahun penjara plus pidana tambahan pencabutan hak politik selama 3 tahun. Itu artinya, A baru akan keluar penjara pada Januari 2020. Selain itu, ia tidak memiliki hak untuk dipilih hingga Januari 2023.
- **Tafsir KPU:** Maka A sudah bisa mencalonkan diri pada Pemilu 2024, karena pendaftaran bakal caleg dibuka pada Mei 2023 atau 4 bulan setelah pencabutan hak politiknya berakhir. A tidak perlu menunggu masa jeda 5 tahun lagi, sebab sudah menjalani vonis pencabutan hak politik.
- **Tafsir ICW dan Perludem cs:** Perhitungan KPU keliru. A dianggap baru pulih hak politiknya per Januari 2025. Hitungan ini diperoleh terhitung sejak A bebas dari pidana pokok pada Januari 2020 plus 5 tahun masa jeda, tak peduli apakah ia dijatuhi vonis tambahan pencabutan hak politik atau tidak.
- **Tafsir Bawaslu:** A dianggap baru pulih hak politiknya pada Januari 2028. Hitungan ini didapat terhitung sejak A bebas dari pidana pokok pada Januari 2020, ditambah masa pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan selama 3 tahun hingga Januari 2023. Pada Januari 2023 itu lah, A baru bisa dianggap bebas murni dari segala bentuk pidana. Terhitung sejak 2023 itu lah, masa jeda 5 tahun sebagaimana diamanatkan MK baru berlaku.



Soal Utang Negara Rp 800 M Sri Mulyani Vs Jusuf Hamka Memanas

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dan pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka saling membantah soal utang negara senilai Rp 800 miliar. Menteri Ani mengungkapkan alasan belum mau mencairkan utang negara ke PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) karena pihaknya berpandangan perusahaan tersebut terafiliasi dengan Bank Yama.

"Jadi berbagai hubungan di antara mereka inilah yang menjadi fokus dari kita mengenai kewajiban negara," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Sebagai informasi, utang negara ke Jusuf Hamka berkaitan dengan deposito CMNP di Bank Yama. Pada 1997-1998, keadaan perbankan termasuk Bank Yama mengalami kesulitan likuiditas hingga kebangkrutan, makanya saat itu hadirlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) agar bank bisa membayar kewajiban kepada deposan-deposan.

CMNP sampai saat ini belum mendapatkan gantinya karena dianggap saat itu terafiliasi dengan Bank Yama milik Siti Hardiyanti Rukmana (Mba Tutut). "Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailout dari bank-bank yang ditutup, dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," imbuhnya.

"[Utang] BLBI kita juga belum sepenuhnya kembali, kalau kita lihat [dari] Rp 110 triliun baru Rp 30 triliun [yang kembali]," tambahnya. Dirinya menegaskan bahwa permasalahan

keterkaitan BLBI dan afiliasinya dengan pihak lain, termasuk deposan, adalah sesuatu yang perlu dipelajari betul secara teliti.

"Kita menghormati tetap di satu sisi berbagai proses hukum, tapi kita juga melihat berbagai kepentingan negara dan kepentingan dari keuangan negara terutama karena ini menyangkut hal yang sudah sangat lama.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengungkit dana BLBI yang diberikan pemerintah kepada obligor/debitur pada 1998 belum sepenuhnya kembali. Mengingat kasusnya sudah lama, ia berharap agar terkait masalah utang Jusuf Hamka bisa dibahas lebih detail dalam Satgas BLBI.

"Jadi ini yang memang secara keuangan negara buat kita adalah sesuatu yang perlu untuk kita pelajari betul secara teliti. Kita menghormati tetap di satu sisi berbagai proses hukum, tapi kita juga melihat kepentingan negara dan kepentingan dari keuangan negara, terutama karena ini menyangkut hal yang sudah sangat lama," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), Rionald Silaban menyebut Jusuf Hamka masih memiliki utang ke negara. "Intinya saya ingin pastikan dulu yang punya negara itu sudah tuntas apa belum? Kalau enggak, kan repot," kata Rio kepada awak media di DPR RI, Senin (12/6/2023).

Rio menjelaskan, tiga perusahaan di bawah Citra Marga Nusaphala

Persada (CMNP) masih memiliki tagihan terhadap negara. Nominalnya mencapai ratusan miliar. "Nominalnya ratusan miliar terkait BLBI. Ini grup Citra (CMNP), ya," terang Rio.

Ditanya mengenai perbedaan data, Rio mengaku perbedaan data adalah masalah biasa. Kemenkeu sudah sering menghadapi perbedaan data. "Kalau soal angka kan memang selalu beda. Tapi yang pertama kita pastikan bahwa itu gugatannya tahun 2004 sampai peninjauan kembali (PK) 2010," ungkap dia

Tantang Menkeu Buktikan

Pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka membantah memiliki utang ratusan miliar ke negara terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bahkan, dia menantang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuktikan tuduhan tersebut.

"Bohong! Mana ada? Periksa saja. Nggak benar itu, kalau ada sudah ditagih dan ini nggak ada penagihan apa-apa. Jadi jangan asbun (asal bunyi)," Jusuf Hamka kepada awak media, Senin (12/6/2023). "Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau CMNP ada utang, saya ganti 100 kali lipat," tegasnya.

Jusuf mengaku alasan Kemenkeu ogah bayar utang juga tidak masuk akal. Mengingat utang pemerintah hanya miliaran bukan triliunan. "Ya pasti nggak masuk di akal, Rp 30 triliun, Rp 8 triliun, Rp 349 triliun, itu triliunan semua. Saya enggak sampe

triliun, cuma miliar," kata Jusuf.

Sebagai informasi, Jusuf Hamka telah berupaya melakukan penagihan utang kepada pemerintah sejak tahun 2004 melalui jalur hukum. Penyelesaian utang tersebut berakhir di meja hijau pada tahun 2016 lalu dengan memenangkan permohonan dari pihak CMNP.

Sejak putusan tersebut inkrah pemerintah juga belum membayarkan kewajibannya seperserpun. Meski sudah mengaku pasrah menagih utang ke pemerintah, namun dia masih tetap ingin uangnya kembali.

"Kita pasrah kepada sang khalik ya sudah mungkin duit kita ada manfaatnya negara pinjem dulu. Tapi jangan lupa negara bayar 2 persen, sampai kapan pun 2 persen enggak akan stop," tegas Jusuf.

Jusuf meminta Kementerian Keuangan tidak memutarbalikkan fakta yang terjadi. Dia mengaku sudah beberapa kali digocek Kemenkeu. "Tolong dong jangan diputar balik, Ibu ku, Ibu Menteri Sri Mulyani yang saya hormati, yang saya banggakan. Nggak kasihan kali sama rakyat. Masa begini, diputar-putar, digocek melulu," terang Jusuf. (wid,rls,kum/dya)

SIAPA JUSUF HAMKA?

- Lahir di Samarinda pada 5 Desember 1957.
- Nama Mohammad Jusuf Hamka
- Memiliki nama asli Joseph Alun (Anak angkat ulama Buya Hamka)
- Pengusaha di bidang pembangunan jalan bebas hambatan (tol).
- **Jejak Hidup**
 - a) Mohammad Jusuf Hamka pernah menjadi pedagang asongan saat berusia 10 tahun.
 - b) Beberapa kampus yang pernah didicincinya, antara lain Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (1974), Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (1974), Administrasi Bisnis di Columbia College (1977), dan jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jayabaya (1980).
 - c) Sejak 1986, ia mulai mengawali kariernya dengan bekerja di perusahaan bidang konstruksi jalanan sebagai sopir.
 - d) Ia juga pernah mendirikan usaha pabrik kayu lapis di Samarinda, tetapi berhenti beroperasi lantaran tidak membayar dana reboisasi.
 - e) Sebelum menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), ia memiliki kedekatan dengan pemegang saham perusahaan itu.
- **Aset Jusuf Hamka**
 - f) Tol Cawang-Tanjung Priok atau Tol Ir. Wiyoto Wiyono yang menerapkan sistem layang dengan teknik Sosrobahu.
 - g) Tol Soreang-Pasirkoja, Tol Depok-Antasari (Andara), dan Tol Waru-Juanda.
 - h) SUV Premium Audi Q7 (2015) seharga Rp 25 miliar
 - i) SUV Premium Audi E4 senilai Rp 1,25 miliar.
 - j) Membeli 35 unit mobil listrik Wuling Air EV seharga Rp 238 juta sampai Rp 295 juta per unit.



SRI MULYANI